

IMPLEMENTASI PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN BONTANG KUALA KOTA BONTANG

Sitti Awaliya¹Bambang Irawan²,Chatas Teguh Prakoso³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program fasilitasi partisipasi masyarakat di Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang dan untuk menganalisis faktor penghambatnya. Program fasilitasi ini merupakan program pemberian bantuan dana 50 juta rupiah pertahun untuk pelaksanaan program pembangunan di tingkat RT yang pemanfaatannya di prioritaskan untuk meningkatkan pembangunan di lingkungan RT. Pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan masing-masing RT sesuai dengan peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011. Penelitian implementasi di fokuskan pada perencanaan, penyaluran bahan, pendampingan dan pengawasan oleh tim kelurahan dan kecamatan serta tingkat partisipasi masyarakat terhadap program ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.Data utama penelitian berasal dari informasi informan didukung dengan observasi dan sumber dokumen.Teknik analisis data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan.

Dari penelitian dapat di simpulkan bahwa Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kota Bontang sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011, berupa dana bantuan sebesar 50 juta rupiah per-RT belum terimplemntasikan sesuai dengan yang di diharapkan. Walaupun penyusunan program sudah dilakukan melalui rembung warga RT, namun masih ada kendala dalam merealisasi program-programnya, diantaranya kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dan mobilisasi materialnya. Temuan lain adalah masalah pendanan yang pencairannya kurang tepat waktu.

Kata Kunci : implementasi, kebijakan, partisipasi.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

²Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³Dosen Pembimbing 2,Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus, bertahap, dan berkesinambungan dalam mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seluruhnya, sehingga pembangunan nasional harus dilaksanakan merata dan tidak hanya satu golongan tetapi untuk seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang adil, sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Pada undang-undang No 23 Tahun 2014 yang menyatakan peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, dan daerah kabupaten/kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk hak-hak seperti hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang sama serta adil.

Peran pemerintah saat ini hanya sebagai fasilitator, regulator, motivator dalam penyediaan prasarana publik. Masyarakatlah sebagai pelaku utama pembangunan. Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dianggap dapat mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi. Akan tetapi pada kenyataannya adalah bahwa keterlibatan masyarakat masih sangat terbatas, sehingga peran pemerintah dalam hal pendekatan melalui program-program dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga tidak sampai kepada masyarakat.

Begitu juga dengan Kota Bontang sebagai salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah kotatelah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan pembangunan di Kota Taman. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 tahun 2011 tentang pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat akan menjadi acuan dan pedoman bagi masing-masing tiap kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan. Salah satu program pemerintah Kota Bontang yaitu Bantuan Rp 50 juta Per RT, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintah Kota Bontang Tahun 2011-2016 dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembanguan ditingkat RT diimplementasikan dengan kegiatan berupa peningkatan peran serta masyarakat RT dalam bentuk Program Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dilatarbelakangi beberapa hal, antara lain :1)Masih terdapat kesenjangan dan belum meratanya pembangunan ditingkat Rukun Tetangga (RT) khususnya ketersediaan sarana dan prasarana umum, serta kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat.2)Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun oleh pemerintah maupun dukungan swadaya masyarakat serta masih perlunya membangun masyarakat yang berbudi luhur. 3)Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ditingkat

Rukun Tetangga (RT) maka pemerintah Kota Bontang menyelenggarakan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT, agar Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan tepat sasaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.

Di kelurahan Bontang Kuala kecamatan Bontang Utara kota Bontang terdapat 20 RT yang menerima program 50 juta rupiah per-RT. Proses rencana penggunaan dana tersebut dilakukan melalui musyawarah warga untuk mendapatkan kesepakatan bersama, yang selanjutnya diajukan rincian data program kegiatan pembangunan ke kelurahan. Untuk meningkatkan pembangunan, ketua RT dan masyarakat yang ada di setiap Kelurahan Kota Bontang harus memahami betul apa saja yang menjadi kebutuhan dan masalah – masalah penting yang dihadapi oleh setiap RT. Karena itu ketua RT dalam melakukan perencanaan harus mengikutsertakan seluruh masyarakat di lingkungan RT tanpa terkecuali melalui kegiatan musyawarah (rembug warga) untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan penting di lingkungannya, sehingga usaha-usaha pembangunan yang berlangsung benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan pemerintah adalah untuk mensejahterahkan masyarakat dengan program ini diharapkan RT dapat mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat menjadi bahan pertanyaan mengenai prolita di Bontang Kuala, apakah implementasi prolita sudah dijalankan sesuai prosedur atau tidak. Seperti yang telah di kemukakan oleh Barnadie Wijaya & Susilo Supardo (2006:81) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah yang penulis kemukakan sebagai perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang?

KERANGKA DASAR TEORI

Otonomi Daerah

Sarundajang (2005:76), otonomi adalah segala tugas yang ada pada daerah atau dengan kata lain, apanya harus dikerjakan oleh pemerintah. Adapun tugas daerah itu dalam istilah adalah kewenangan implisit dimana didalamnya adalah kekuasaan, hak dan kewajiban yang diberikan kepada daerah dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya menurut Said (2005:6)

otonomi daerah dapat dipahami sebagai proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan Nurcholis (2007:30) otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan yang berlaku.

Kebijakan Publik

Harbani Pasolong (2007:38), mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bernuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Dalam mengimplementasikan kebijakan membutuhkan pelaksana yang benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku.

Chaizi Nasucha (2004:37), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Menurut A.Pal dalam Widodo (2006:10) dikategorikan menjadi dua macam. Kategori pertama, definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama sebagai kunci kriteria. Kategori kedua, lebih menekankan pada dampak dari tindakan pemerintah berkaitan dengan pemerintah tersebut.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang krusial dalam studi kebijakan publik. Menurut Anderson dalam Tahir (2014:12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian menurut Nurcholis (2007:263) kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku.

Menurut Nurdin Usman (2002:70) implementasi bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktifitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan (2004:39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi mencakup kerjasama antara semua unsur terkait dan merupakan suatu kesepakatan, harapan, persepsi dan sistem komunikasi dimana kemampuan dan pendidikan mempengaruhi sikap dan cara berperilaku seseorang. Kariangga mengatakan (2011:221) partisipasi masyarakat merupakan proses dimana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan.

Menurut Patton (2005:88) mengemukakan bahwa “inisiatif atau prakarsa dalam berpartisipasi bisa berasal dari bawah atau masyarakat itu sendiri (bottom up) dan berasal dari pemerintah (top down). Di mana dalam pembangunan desa atau kelurahan bentuk swadaya yang berupa prakarsa dan inisiatif merupakan titik awal dari partisipasi masyarakat”.

Menurut Suryana (2010:90) partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat, dan mengelola, memonitor, dan mengevaluasi sampai menentukan pendistribusian manfaat dari perkembangan yang dilakukan supaya ada kesetaraan.

Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Menurut siagan dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2006:40) perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pada dasarnya adalah penetapan alternatif, yaitu menentukan bidang-bidang dan langkah perencanaan yang akan diambil dari berbagai kemungkinan bidang dan langkah yang ada, bidang dan langkah tentu saja di pandang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang tersedia dan mempunyai resiko yang sekecil-kecilnya.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan judul yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini maka definisi konsepsional dari Implementasi Program Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Kuala adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya tingkat RT, yaitu dalam bidang pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial. Untuk itu masyarakat juga di tuntut ikut serta berperan dalam membangun daerahnya. Dengan berperannya masyarakat dalam pembangunan tentunya sangat membantu pemerintah dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan setiap masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang ditelit sesuai

dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012:2).

Menurut Moleong (2007:6) metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan isi pedoman Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 39 tahun 2011, agar memudahkan dalam pelaksanaan penelitian perlu ditetapkan suatu fokus penelitian yaitu:

1. Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Kuala
 - a. Perencanaan kegiatan program implementasi fasilitasi partisipasi masyarakat
 - b. Penyaluran bahan Program Fasilitasi Partisipasi masyarakat
 - c. Pendampingan dan pengawasan kepada RT oleh tim kelurahan dan kecamatan.
 - d. Partisipasi masyarakat terhadap implementasi program fasilitasi partisipasi masyarakat
2. Faktor penghambat yang terjadi di kelurahan Bontang Kuala terhadap Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat.

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bentuk data, antara lain :

1. Data Primer
Data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian ini bersumber dari data utama. Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian yaitu para pihak yang menjadi sumber informasi yang memahami tentang variabel yang diteliti.
2. Data Sekunder
Pada data sekunder data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya misalnya dokumen resmi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan dua teknik pengumpulan data, antara lain :

1. Penelitian ke perpustakaan (library research)
Pengumpulan data dilakukan dengan menggali, mempelajari sumber atau bahan yang diperlukan sebagai landasan penelitian berupa teori dan konsep yang keabsahannya sudah terjamin. Data tersebut dapat diperoleh melalui buku yang berkaitan dengan teori pelayanan publik.
2. Penelitian lapangan (field work research)
Pengumpulan data-data, informasi dan bahan secara langsung kelapangan lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data di lapangan antara lain yaitu :
 - a. Observasi yaitu pengamatan dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pemelihan, pencatatan, dan pengkodean terhadap serangkaian perilaku, gejala-gejala dan fenomena yang diteliti.
 - b. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dan secara langsung antara observasi dengan informan yang diarahkan pada masalah tertentu secara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun peneliti berdasarkan fokus penelitian.
 - c. Dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai dokumen atau arsip yang menyangkut masalah Prolita di kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang.

Teknik Analisis Data

. Berikut penjelasan dari alur kegiatan dari analisis data yaitu :

1. Pengumpulan data
Pengumpulan data yaitu pengumpulan data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Reduksi data
Reduksi data atau penyederhanaan data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dengan membuat abstraksi, mengubah data mentah menjadi yang di kumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang mempertajam atau memusatkan, membuat sekaligus dapat dibuktikan.
3. Penyajian data
Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan yang lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
4. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metedologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum.

HASIL PENELITIAN

Perencanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diatas bahwa pelaksanaan program fasilitasi partisipasi masyarakat dilaksanakan setelah adanya edaran dari pemerintah kota mengenai pelaksanaan program 50 juta rupiah per RT dan dari pihak kelurahan membentuk panitia pelaksana tim kelurahan untuk pelaksanaan prolita. Kemudian pihak kelurahan memberikan edaran berupa surat tembusan mengenai prolita agar ketua RT dapat mengumpulkan warganya untuk dapat melakukan rembug warga. tidak hanya warga yang diundang tetapi juga ada tokoh masyarakat yang hadir dan menyaksikan kegiatan rembug tersebut. Rembug tersebut diadakan pada masing-masing RT sesuai dengan waktu, tanggal dan tempat yang telah di tentukan oleh pihak kelurahan. Sebelum rembug dimulai pihak kelurahan melakukan sosialisasi dahulu terkait dengan program dana bantuan sebesar 50 juta rupiah per RT, kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program yaitu berupa kegiatan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan infrastruktur sesuai dengan buku peraturan walikota tentang program lima puluh juta rupiah. Dalam penggunaan dana program Fasilitas Partisipasi Masyarakat yaitu Prolita di bagi menjadi tiga kegiatan yang besaran dananya adalah 60% untuk kegiatan di bidang infrastruktur, 20% untuk kegiatan bidang sosial, dan 20% untuk kegiatan bidang ekonomi.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa perencanaan program Fasilitasi partisipasi masyarakat di tingkat RT di lakukan dengan mengadakan rembug warga. Rembug warga di hadiri oleh pihak kelurahan, ketua RT, tokoh masyarakat yaitu tokoh agama dan LPPM, dan masyarakat di lingkungan. Dalam pertemuan tersebut pihak kelurahan memberikan sosialisasi kepada warga terkait program fasilitasi partisipasi masyarakat yaitu Prolita. Warga di berikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat mereka terkait kegiatan apa yang akan dilakukan dan kekurangan apa yang di butuhkan di lingkungan RT mereka. Kemudian ketua RT di bantu oleh sekretaris RT mendata pendapat para warga berdasarkan usulan atau pendapat prioritas warga. Hasil rembug warga di data menggunakan form yang terdapat jenis kegiatan /pekerjaan dan volume kegiatan/pekerjaan dan di serahkan ke kelurahan. Dari kelurahan kemudian memverifikasi kegiatan yang akan di laksanakan masing-masing RT kemudian menyerahkan berkas kegiatan ke Bappeda. Bappeda kemudian membuat DPA untuk kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat yang kemudian di serahkan kembali ke kelurahan.

Penyaluran Bahan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Dari hasil penelitian dalam lapangan proses penyaluran barang bantuan program Fasilitasi partisipasi Masyarakat adalah melalui CV yang telah

bersedia bekerjasama dengan pemerintah dalam hal pengadaan barang. Cv yang telah di tunjuk tersebut menyediakan barang yang di butuhkan oleh masyarakat dari semua RT yang terkait berdasarkan waktu yang telah di tentukan. Kemudian setelah barang yang di butuhkan telah tersedia pihak CV lalu memberi kabar kepada pihak kelurahan bahwa barang telah siap untuk di salurkan. Dari kelurahan lalu menginfokan kepada para ketua RT dan warganya agar dapat datang dan mengambil barang terminal. Karena banyaknya ketua RT yang bertempat tinggal di bagian atas air daripada ketua RT yang bertempat tinggal di darat oleh karena itu barang di tempatkan di terminal kelurahan Bontang Kuala. Dari pihak CV melakukan serah terima barang kepada ketua RT yang di saksikan oleh tim kelurahan dan warga yang hadir. Setelah barang diterima oleh ketua RT kemudian di lanjutkan ke pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah di rencanakan oleh masing-masing RT.

Pendampingan oleh Kelurahan Bontang Kuala

Hasil dari pelaksanaan program, kelurahan melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan program fasilitasi partisipasi masyarakat kepada Walikota melalui kantor pemberdayaan masyarakat. Hasil pertanggung jawaban pelaksanaan program, kelurahan membuat laporan akhir Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat kepada Walikota dan kantor pemberdayaan Masyarakat (KPM) dengan tembusan di sampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat di lingkungan RT. Hal ini di tunjukkan dengan masih adanya warga yang tidak hadir dalam rembug yang telah di tetapkan oleh pihak kelurahan. Padahal pendapat dari mereka sangat dibutuhkan untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasana di wilayah RT mereka. Tentunya dapat disimpulkan bahwa di masing-masing RT memiliki permasalahan dengan warganya dalam bidang partisipasi masyarakat.

Faktor Penghambat Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang

Dari hasil data yang di dapatkan dapat disimpulkan bahwa Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di kelurahan Bontang Kuala tidak berjalan dengan semestinya. Masih terdapat warga yang belum mengetahui tentang program tersebut dan adanya pemangkasan anggaran di semua RT di kelurahan Bontang Kuala yang besarnya tidak sama dalam setiap RT.

semua warga datang dalam rapat yang diadakan pihak kelurahan di lingkungan RT.

Faktor Pendukung dalam Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Dengan adanya bantuan pemerintah terkait program fasilitasi partisipasi masyarakat, masyarakat sangat terbantu. Dana anggaran sebesar 50 juta di manfaatkan baik oleh masyarakat untuk meningkatkan pembangunan di lingkungan RT masing-masing.

PEMBAHASAN

Perencanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan peraturan Walikota Bontang tentang program Fasilitasi partisipasi masyarakat bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam program berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat dalam rembuk warga. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang penulis teliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan program fasilitasi partisipasi masyarakat yang dilakukan di tingkat RT sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Masyarakat mengadakan rembuk dan memberikan usulan-usulan kegiatan yang sekiranya membantu untuk meningkatkan dan mengatasi permasalahan yang ada di tingkat RT masing-masing.

Penyaluran Bahan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Penyaluran barang bantuan ada yang tidak diantarkan secara langsung kerumah ketua RT karena terkendala dengan daerah yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan pengangkut barang bantuan. Daerah Bontang Kuala merupakan daerah yang memiliki penduduk yang bertempat tinggal di atas laut atau rumah apung. Hal ini menyebabkan penyaluran barang hanya sampai pada terminal, yaitu lokasi sebelum memasuki daerah pemukiman rumah apung Bontang Kuala. Kemudian dalam penyaluran barang kepada RT dari Toko bangunan atau CV terdapat barang yang rusak atau tidak sesuai dengan yang diminta tapi dari pihak CV dengan cepat menanggapi dan mengganti barang yang sesuai, namun harus menunggu beberapa hari barang yang ditukar sampai ke terminal.

Pendampingan oleh Kelurahan Bontang Kuala

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pendampingan yang dilakukan kelurahan dalam bentuk sosialisasi dalam rembuk, bimbingan teknis, mendampingi penerimaan bahan bantuan di RT dan di teruskan ke masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan sangat membantu warga untuk mengetahui dan menentukan kegiatan yang akan dilakukan di Rt mereka.

Untuk melaksanakan program, kelurahan menghimbau kepada seluruh RT untuk mengadakan rembug warga untuk membuat rencana program pembangunan yang dilakukan di lingkungan RT. Dalam pelaksanaan rembug warga pihak kelurahan hadir dalam rapat, menghimbau apa saja yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan apa saja yang masuk dan tidak masuk dalam anggaran yang diajukan. Dalam pencairan dana kelurahan memberitahu bahwa pencairan tidak dalam bentuk uang tunai melainkan material yang sesuai dengan kegiatan yang diajukan. Pengadaan barang dilaksanakan oleh kelurahan, RT dan sekretaris menyaksikan dan memeriksa barang yang telah diajukan, jika sudah sesuai dengan yang telah dianggarkan maka pihak kelurahan akan membuat berita acara serah terima kepada ketua RT.

Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan walikota bahwa tujuan program fasilitasi partisipasi masyarakat adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berpegang teguh bahwa rembug warga sebagai pengambilan keputusan tertinggi.

Dari pembahasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi yang berlangsung di tingkat RT kelurahan Bontang Kuala masih rendah. Masih adanya masyarakat yang tidak hadir dan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (rembug) dan juga sikap pasif dari masyarakat terhadap kegiatan program yang dilaksanakan di lingkungan RT masing-masing.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Secara keseluruhan Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang dalam peraturan yang menjadi dasar Program Fasilitasi Partisipasi masyarakat, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program fasilitasi partisipasi masyarakat dalam hal proses perencanaan yaitu rembug warga.
2. Sosialisasi yang terjadi terhadap warga masih kurang optimal, karena masih banyak warga yang tidak mengetahui tentang program fasilitasi partisipasi masyarakat.
3. Sumber daya dalam hal ini adalah anggaran. Anggaran yang kurang karena adanya pemangkasan yang terjadi dalam proses implementasi tersebut mengakibatkan banyaknya perubahan yang di hapus di dalam daftar usulan yang telah di sepakati dari awal.

Faktor Pendukung Dalam Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Dalam berlangsungnya program bantuan ini, yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, fasilitas dan sarana prasarana masyarakat, berikut faktor pendukung dari program fasilitasi partisipasi masyarakat:

1. Kegiatan pembangunan yang dilakukan di tingkat RT adalah hasil dari rembukan warga. warga mengusulkan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pembangunan di sekitar lingkungan RT mereka. Kegiatan tersebut berupa kegiatan di bidang ekonomi, sosial dan infrastruktur.
2. Ketersediaan anggaran. Tersedianya anggaran dalam Program Fasilitasi partisipasi masyarakat sangat membantu dalam peningkatan pembangunan di lingkungan RT. ketersediaan anggaran dalam program ini berupa barang dan tidak dalam bentuk uang.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada akhir dari skripsi ini penulis menarik kesimpulan dan saran-saran khususnya mengenai Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang.

1. Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kota Bontang sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011, berupa dana bantuan sebesar 50 juta rupiah per-RT tidak berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Adapun beberapa kendala yang di hadapi dalam proses Implementasi di lapangan, sesuai dengan yang Dapat dilihat sebagai berikut :
 - a. Dalam perencanaan program fasilitasi partisipasi masyarakat rembukan yang dilakukan di tingkat RT warga di beri kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya dan memberikan usulan mengenai kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan di lingkungan RT nya,
 - b. Penyaluran barang pada Program fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang dilakukan oleh CV sebagai penyedia barang dan menyalurkan barang sesuai dengan data usulan setiap RT. Penyaluran barang dilakukan ke rumah RT masing-masing, walaupun terkendala dengan penyaluran kepada RT yang bertempat tinggal di atas laut atau rumah apung di karenakan tidak bisa masuknya mobil pengangkut barang, sehingga barang di tempatkan pada area parkir perumahan apung Bontang Kuala.
 - c. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kelurahan Bontang Kuala adalah berupa sosialisasi yang dilakukan sekali

dalam rembuk warga, bimbingan teknis atau pendampingan terhadap warga.. Sedangkan pemantauan yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan kota hanya dilakukan sekali saja dan hanya dilakukan pada saat penyerahan barang kepada warga.

- d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat masih kurang, di karenakan dalam kegiatan pembangunan warga tidak terjun langsung dalam pengadaan barang dan kegiatan yang bersifat fisik, dan juga masih adanya warga yang belum mengetahui tentang program tersebut dan juga warga yang tidak hadir dalam rembuk warga yang dilakukan di tingkat RT.
- e. Faktor pendukung dalam Implementasi Fasilitasi partisipasi Masyarakat adalah warga dapat menentukan kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan di lingkungan RT nya, dan juga faktor pendukung adanya ketersediaan anggaran. Sementara faktor penghambat dalam Implementasi Program Fasilitasi partisipasi Masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat, kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan, dan juga kurangnya anggaran karena terjadi pemangkasan anggaran dalam pelaksanaan program fasilitasi partisipasi masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang implementasi program partisipasi masyarakat masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Kota Bontang dapat berjalan secara maksimal. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Dalam hal partisipasi masyarakat sebaiknya warga dapat terjun langsung dalam kegiatan pembangunan, mulai dari awal kegiatan pembangunan seperti perencanaan, pengadaan barang, pelaksanaan sampai pada tahap akhir kegiatan pembagunan. Terutama dalam hal pengadaan barang dan pengerjaan fisik pembangunan , pemerintah tidak seharusnya menggunakan CV untuk pengadaa barang dan pengerjaan fisik kegiatan. Hal ini justru tidak sesuai dengan tujuan dari program fasilitasi partisipasi masyarakat agar masyarakat dapat langsung ke membangun dalam pembangunan di lingkungannya.
2. Sosialisasi yang dilakukan seharusnya tidak berlangsung sekali saja. karena masih adanya warga yang tidak tahu mengenai program tersebut. Sebaiknya dari pihak kelurahan harus melakukan sosialisasi berlanjut terutama untuk ketua RT yang lebih dekat dengan warga harus bisa menyampaikan dan menjelaskan kepada warganya secara langsung atau dengan memanfaatkan tekhnologi yang ada sekarang, ketua RT dapat memberikan informasi kepada warganya melalui

telepon seluler atau pun dengan membuat grup di kalangan RT tersebut.

3. Dalam proses pemberian dana diharapkan tidak adanya potongan-potongan berupa biaya administrasi dan pemangkasan sehingga dana bantuan yang diberikan dapat maksimal digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sarungdajang, S.H. 2005. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah Upaya Mengantisipasi Kegagalan*. Jakarta : Kata Hasta Pustaka
- Said, M. Mas`ud. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*. Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Grasindo
- Patton, Adri. 2005. *Peran Informasi Leader Dalam Pembangunan Desa Di Daerah Perbatasan Kabupaten Malinau*. Malang : Universitas Bramawijaya
- Nugroho, Riant D. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : Gramedia